

Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brasil Era Bolsonaro-Lula Da Silva

Laila Syakira

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: 2410412175@mahasiswa.upnvj.ac.id

Qiara Kaila Ayyunda

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: 2410412191@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the changes in Brazil’s foreign policy toward multilateral cooperation from the administration of Jair Bolsonaro (2019–2022) to that of Lula da Silva (2023–2025) using the Comparative Foreign Policy (CFP) approach. This period demonstrates a fundamental shift in Brazil’s diplomatic orientation, from a nationalist approach skeptical of multilateralism toward a more inclusive, progressive, and cooperation-driven global policy. Under Bolsonaro, foreign policy experienced a decline in international engagement, marked by Brazil’s withdrawal from several regional forums such as UNASUR and CELAC, as well as weakened commitments to environmental and human rights issues. Conversely, during Lula da Silva’s administration, Brazil reaffirmed its leadership on the international stage through the reactivation of multilateral platforms such as CELAC and BRICS, the strengthening of its role in the G20, and renewed commitments to sustainable development and social justice. The findings indicate that ideological factors, political leadership, and domestic dynamics strongly influence the changes in Brazil’s diplomatic behavior. Lula restored the country’s image as an active and constructive global actor, while policy continuity in areas such as OECD accession reflects strategic consistency amid political shifts. These findings underscore that international reputation and diplomatic legitimacy cannot be separated from domestic policy coherence, particularly in the areas of environmental governance and state administration. This study contributes to strengthening theoretical understanding of the relationship between regime change, political ideology, and multilateral behavior within contemporary foreign policy studies.

Keywords: *Brazil, Multilateralism, Comparative Foreign Policy, Foreign Policy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Brasil terhadap kerjasama multilateral dari era pemerintahan Jair Bolsonaro (2019-2022) ke Lula da Silva (2023-2025) dengan menggunakan pendekatan *Comparative Foreign Policy* (CFP). Periode ini memperlihatkan pergeseran fundamental dalam orientasi diplomasi Brasil, dari pendekatan nasionalis yang skeptis terhadap multilateralisme menuju kebijakan yang lebih inklusif, progresif, dan berbasis kerja sama global. Pada masa Bolsonaro, kebijakan luar negeri cenderung menurun dari sisi partisipasi internasional, ditandai keluarnya Brasil dari beberapa forum kawasan seperti UNASUR dan CELAC, serta melemahnya komitmen terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia. Sebaliknya, pada era Lula da Silva, Brasil kembali

menegaskan kepemimpinannya di kancah internasional melalui reaktivasi forum multilateral seperti CELAC dan BRICS, penguatan peran dalam G20, serta komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ideologi, kepemimpinan politik, dan dinamika domestik berpengaruh kuat terhadap perubahan perilaku diplomasi Brasil. Lula mengembalikan citra negara sebagai aktor global yang aktif dan konstruktif, sementara kesinambungan kebijakan ekonomi seperti akses OECD menunjukkan adanya konsistensi strategis di tengah perubahan politik. Temuan ini menegaskan bahwa reputasi internasional dan legitimasi diplomatik tidak dapat dipisahkan dari konsistensi kebijakan domestik, khususnya dalam bidang lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Kajian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman teoritis mengenai hubungan antara perubahan rezim, ideologi politik, dan perilaku multilateral dalam studi kebijakan luar negeri kontemporer.

Kata Kunci: Brasil, Multilateralisme, *Comparative Foreign Policy*, Kebijakan Luar Negeri.

Pendahuluan

Brasil merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Amerika Latin dan menjadi kekuatan politik serta ekonomi penting di kancah global. Kebijakan luar negeri Brasil menunjukkan posisinya sebagai kekuatan regional dan calon kekuatan dunia, serta dirancang untuk melindungi kepentingan nasional, keamanan negara, tujuan ideologis, dan kesejahteraan ekonomi. Selama masa pemerintahan Lula, perhatian akademis, media, dan masyarakat fokus pada peran Brasil dalam mendukung kepentingan negara-negara di Selatan Global, seperti dalam Dewan Keamanan PBB, kelompok BRICS dan IBSA, serta forum multilateral lainnya. Sebaliknya, selama pemerintahan Bolsonaro, pemikiran rasis yang terbuka dan nyata muncul di tingkat pemerintah, mengingat riwayat Bolsonaro yang terdokumentasi baik dalam menyampaikan komentar tak sensitif terhadap ras di depan publik.

Sejak tahun 2019 kebijakan luar negeri Brasil mengalami perubahan yang sangat signifikan dan berkaitan langsung terhadap posisi negara tersebut dalam tatanan multinasional. Pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro di tahun 2019-2022, arah diplomasi Brasil menunjukkan kecenderungan yang skeptis terhadap multinasional dan lembaga-lembaga internasional. Kebijakan luar negeri di periode ini ditandai dengan penarikan diri Brasil dari sejumlah organisasi regional serta melemahnya komitmen terhadap isu-isu global, khususnya lingkungan dan hak asasi manusia. Keputusan untuk keluar dari *Union of South American Nations* (UNASUR) pada tahun 2019 dan menghentikan partisipasi dalam *Community of Latin American and Caribbean States* (CELAC) pada tahun 2020 memperlihatkan pergeseran orientasi dan kerja sama kolektif menuju pendekatan bilateral yang lebih selektif. Pergeseran ini secara nyata menurunkan peran tradisional Brasil sebagai pemimpin kawasan dan aktor utama dalam integrasi Amerika Latin, serta mengubah citra diplomatik Brasil di mata dunia internasional (Salomón, 2025).

Kebalikan dari arah tersebut mulai terlihat saat Lula da Silva kembali menjabat sebagai presiden di akhir tahun 2022. Pemerintahan Lula berupaya mengembalikan posisi strategis Brasil dalam kerja sama multilateral melalui semboyan "*Brazil is back*" yang diwujudkan secara konkret dengan mengaktifkan kembali partisipasi CELAC, memperkuat diplomasi

lingkungan melalui pengaktifan kembali Amazon Fund, dan memimpin forum-forum global seperti G20. Reorientasi ini mencerminkan upaya rekonstruksi reputasi Brasil sebagai negara demokratis yang berkomitmen pada solidaritas Selatan-Selatan, keadaan iklim, dan reformasi tata kelola global. Kebijakan di masa ini juga menempatkan diplomasi lingkungan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan legitimasi internasional Brasil setelah penurunan reputasi global di era Bolsonaro (Carlos and Rodrigues, 2025).

Meski demikian dinamika kebijakan luar negeri Brasil sepanjang 2019-2025 tidak sepenuhnya memperlihatkan pertentangan yang mutlak. Dalam beberapa aspek terdapat kesinambungan kepentingan strategis, seperti keikutsertaan dalam proses akses ke *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang dimulai pada masa Bolsonaro tetap dilanjutkan pada era Lula. Langkah ini menunjukkan bahwa di balik perubahan orientasi ideologis dan pendekatan diplomatik, terdapat elemen konsistensi berupa pencarian legitimasi ekonomi internasional dan peningkatan status global. Dengan begitu, kebijakan Brasil tidak hanya menunjukkan pola perubahan (*change*), tetapi juga kesinambungan (*continuity*) dalam mempertahankan kepentingan nasional jangka panjang.

Pendekatan *Comparative Foreign Policy* (CFP) menjadi kerangka yang relevan untuk memahami perubahan dan kesinambungan tersebut. Pendekatan CFP menekankan perbandingan antiperiode pemerintahan guna melihat bagaimana faktor domestik seperti ideologi, kepentingan politik, dan struktur ekonomi mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri. Melalui pendekatan CFP, penelitian ini menilai bagaimana dua pemerintahan dengan latar belakang politik yang berbeda menerjemahkan tujuan strategis nasional ke perilaku diplomatik forum multilateral (Soreanu, 2021).

Terdapat kesenjangan fenomena yang penting untuk diangkat dalam penelitian ini. Pertama, belum banyak studi yang secara komparatif membandingkan keterlibatan Brasil pada berbagai forum multilateral lintas pemerintahan, sehingga hubungan antara pilihan forum dan hasil kebijakan belum tergambarkan secara utuh. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif tanpa indikator empiris yang mengukur tingkat intensitas dan kualitas keterlibatan Brasil, seperti kepemimpinan agenda, kontribusi finansial, atau hasil deklaratif. Ketiga, hubungan antara reposisi domestik terutama dalam isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan dengan daya tawar diplomasi multilateral belum banyak dianalisis secara mendalam, padahal saat era Lula legitimasi lingkungan menjadi modal utama dalam meningkatkan posisi tawar global. Keempat, masih terbatasnya analisis mengenai kesinambungan kebijakan luar negeri di tengah perubahan rezim, sehingga kecenderungan “disrupsi total” sering menutupi elemen keberlanjutan yang penting bagi stabilitas kebijakan jangka panjang (Duarte, 2025).

Terdapat kesenjangan fenomena yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini. Pertama, belum banyak studi yang secara komparatif membandingkan keterlibatan Brasil pada berbagai forum multilateral lintas pemerintahan, sehingga hubungan antara pilihan forum dan hasil kebijakan belum tergambarkan secara utuh. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif tanpa indikator empiris yang mengukur tingkat intensitas dan kualitas keterlibatan Brasil, seperti kepemimpinan agenda, kontribusi finansial, atau hasil deklaratif. Ketiga, hubungan antara reposisi domestik terutama dalam isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan dengan daya tawar diplomasi terutama dalam isu lingkungan dan tata kelola

pemerintahan dengan daya tawar diplomasi multilateral belum banyak dianalisis secara mendalam, padahal di era Lula legitimasi lingkungan masih menjadi model utama dalam meningkatkan posisi tawar global. Keempat, masih terbatasnya analisis mengenai kesinambungan kebijakan luar negeri di tengah perubahan rezim, sehingga kecenderungan “disrupsi total” sering menutupi elemen keberlanjutan yang penting bagi stabilitas kebijakan jangka panjang (Duarte, 2025).

Bertolak dari kesenjangan tersebut penelitian ini berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil pada Kerja Sama Multilateral dari Era Jair Bolsonaro ke Lula da Silva melalui Pendekatan Comparative Foreign Policy Tahun 2019–2025”. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komparatif yang sistematis terhadap perubahan orientasi, instrumen, dan strategi kebijakan luar negeri Brasil pada dua periode pemerintahan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi perubahan kebijakan luar negeri dengan menunjukkan keterkaitan antara ideologi rezim, faktor domestik, dan perilaku diplomatik di arena multilateral. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi diplomasi yang adaptif terhadap perubahan politik domestik, namun tetap menjaga konsistensi kepentingan nasional dan keberlanjutan posisi Brasil sebagai aktor penting dalam sistem internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain **studi komparatif**. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin melihat secara langsung bagaimana arah dan karakter kebijakan luar negeri Brasil berubah antara pemerintahan Jair Bolsonaro dan Lula da Silva. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami konteks, latar belakang, dan pertimbangan yang melandasi keputusan diplomatik pada masing-masing periode, sementara desain komparatif membantu memperjelas perbedaan maupun kesinambungan kebijakan di dua rezim yang memiliki orientasi politik berbeda.

Data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari **studi pustaka**. Sumber yang digunakan meliputi dokumen resmi pemerintah Brasil, pernyataan dan pidato presiden, laporan lembaga internasional seperti BRICS, G20, dan CELAC, serta organisasi penelitian. Selain itu, penelitian juga merujuk pada artikel jurnal, buku, dan berita internasional yang memberikan gambaran mengenai posisi Brasil dalam isu lingkungan, multilateralisme, dan hubungan internasional. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang sistematis. Peneliti mengidentifikasi isu-isu utama pada masing-masing periode pemerintahan, seperti sikap terhadap multilateralisme, peran Brasil di forum internasional, kebijakan lingkungan, serta hubungan antara presiden dengan birokrasi diplomatik Itamaraty. Semua data yang ditemukan kemudian diseleksi, dicatat, dan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tematik.

Analisis data dilakukan dengan cara **membaca, menafsirkan, dan membandingkan** informasi yang diperoleh. Pada tahap awal, peneliti mereduksi data dengan memisahkan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Setelah itu, temuan disusun dalam bentuk deskripsi sehingga memperlihatkan pola, pergeseran, dan kecenderungan

kebijakan luar negeri pada masing-masing pemerintahan. Perbandingan dilakukan tidak hanya pada hasil akhirnya, tetapi juga pada alasan, nilai, dan konteks domestik yang memengaruhi kebijakan tersebut.

Kerangka *Comparative Foreign Policy (CFP)* digunakan untuk membantu membaca temuan penelitian. Melalui teori ini, perbandingan tidak berhenti pada apa yang berbeda di permukaan, tetapi menelusuri faktor-faktor domestik, gaya kepemimpinan, dan tekanan sistem internasional yang membentuk perilaku luar negeri Brasil. Dengan cara ini, penelitian dapat menunjukkan pada bagian mana perubahan kebijakan terjadi, dan pada aspek apa Brasil tetap mempertahankan garis kebijakan yang sama meskipun rezimnya berganti.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah **kebijakan luar negeri Brasil** dalam konteks kerja sama multilateral, terutama pada forum seperti BRICS, G20, dan CELAC. Penelitian ini dibatasi pada periode 2019–2025, mengikuti masa pemerintahan Jair Bolsonaro dan Lula da Silva, sehingga tidak membahas periode sebelum atau sesudahnya secara mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menempatkan perubahan kebijakan luar negeri Brasil sepanjang dua periode kepemimpinan yang kontras sebagai kaca pembesar untuk memahami arah baru keterlibatan multilateral negara tersebut. Pada masa Jair Bolsonaro, preferensi kebijakan luar negeri menunjukkan penekanan kuat pada kedaulatan domestik, resistensi terhadap lembaga internasional, dan penurunan intensitas partisipasi dalam berbagai forum kawasan. Sikap ini berdampak langsung pada posisi tawar Brasil karena reputasi dan konsistensi komitmen merupakan modal penting dalam diplomasi multilateral. Ketika negara menurunkan kehadiran, meminimalkan kepemimpinan isu, dan mereduksi komitmen lingkungan, kredibilitas dalam perundingan global ikut tergerus. Seperti dicatat Buarque (2023), perubahan orientasi ini tidak hanya soal retorika, tetapi memengaruhi jaringan koalisi, akses agenda bersama, serta kemampuan Brasil membentuk hasil deklaratif di forum strategis.

Temuan ini sejalan dengan analisis teman penulis yang menekankan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Brasil dari masa Jair Bolsonaro ke masa Lula da Silva memang memperlihatkan perbedaan signifikan dalam pandangan, nilai, serta cara Brasil memposisikan diri di dunia internasional. Bolsonaro menganggap multilateralisme sebagai ancaman terhadap kebebasan nasional dan alat dominasi negara-negara Barat, sedangkan Lula melihat multilateralisme sebagai cara utama memperkuat posisi Brasil sebagai pemimpin negara-negara berkembang dan penyelaras global. BRICS (2023), bahkan mencatat bagaimana Lula menegaskan multilateralisme sebagai “satu-satunya jalan” untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih adil.

Perbedaan ini tampak jelas dalam keterlibatan Brasil di BRICS. Pada masa Bolsonaro, Brasil mengalami penurunan minat strategis dan semakin pasif dalam forum tersebut. Negara tidak memiliki visi jelas untuk memanfaatkan BRICS sebagai sarana menyeimbangkan dominasi Barat dan cenderung mengarahkan orientasi bilateral ke Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Di sisi lain, ketika Lula kembali berkuasa, posisi Brasil dalam BRICS kembali aktif, terutama dalam agenda reformasi sistem keuangan global, dedolarisasi, perluasan BRICS+, serta penguatan solidaritas Global South. Temuan dari Khatimah & Burhanuddin (UNHAS) menegaskan bahwa ketika Brasil pasif pada periode Bolsonaro, negara tersebut tertinggal dari

dinamika geopolitik yang berkembang pesat dan harus mengejar ketertinggalan itu pada masa Lula melalui diplomasi multilateral yang lebih progresif.

Perbandingan lebih terstruktur antara kedua periode dapat dilihat melalui tabel berikut:

Table 1. Data visualisasi

Aspek Analisis	Era Jair Bolsonaro (2019–2022)	Era Lula da Silva (2023–Sekarang)
Orientasi Ideologis	Kanan-populis, nasionalis, anti-globalis; kedekatan kuat dengan AS (Donald Trump).	Kiri-progresif, pro- <i>global governance</i> , pro- <i>Global South</i> , menekankan multipolaritas.
Pandangan terhadap Multilateralisme	Skeptis; menganggap multilateralisme mengancam kedaulatan; kehadiran rendah dalam forum internasional.	Melihat multilateralisme sebagai satu-satunya jalan mencapai keadilan global dan kepemimpinan Brasil. (BRICS, 2023)
Keterlibatan BRICS	Pasif; tidak memiliki visi strategis; menurunkan engagement diplomatik	Sangat aktif; mendukung perluasan BRICS+; mendorong reformasi keuangan global dan dedolarisasi.
Kebijakan Hak Asasi Manusia	Banyak kritik: retorika anti minoritas, kriminalisasi LSM lingkungan, pembatasan sipil.	Mengembalikan agenda HAM: perlindungan minoritas, kebebasan LSM, inklusivitas global.
Isu Lingkungan	Deregulasi; deforestasi tinggi; konflik internasional; kritik global.	Reforestasi; penegakan hukum; diplomasi lingkungan proaktif; dukungan internasional kembali mengalir.

Sumber: *GIGA Hamburg (2020)*.

Masuk ke era Lula da Silva, arus kebijakan diplomasi Brasil beralih ke pemulihan peran multilateral dan penataan ulang reputasi internasional. Semboyan “*Brazil is back*” diwujudkan melalui peningkatan kehadiran dalam forum kawasan, pengaktifan kanal diplomasi lingkungan, serta agenda global yang menghubungkan ketimpangan ekonomi, perlindungan hutan, dan pembiayaan pembangunan. Salomón (2025), menekankan bahwa perubahan ini menunjukkan bagaimana nilai dan persepsi pemimpin dapat menggeser fungsi forum multilateral dari sekadar arena representasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pengaruh dan memperluas jejaring internasional.

Kerangka *Comparative Foreign Policy (CFP)* membantu merinci perbedaan ini melalui empat ranah: pilihan forum, preferensi isu, gaya diplomasi, dan instrumen kebijakan. Pada masa Bolsonaro terjadi reduksi keterlibatan dalam arsitektur kawasan, sementara pada masa Lula

terlihat adanya reaktivasi forum kawasan dan perimbangan antara platform regional dan global. Preferensi isu juga berubah: Bolsonaro mengutamakan kedaulatan dan liberalisasi selektif, sedangkan Lula menjadikan keadilan sosial, iklim, dan tata kelola inklusif sebagai jangkar legitimasi. Gaya diplomasi pun bergeser dari konfrontatif dan sempit ke pola yang lebih dialogis dan berorientasi koalisi yang melibatkan negara berkembang dan mitra industri.

Dari sisi domestik, polarisasi politik, komposisi kabinet, dan hubungan presiden dengan birokrasi diplomatik memengaruhi kapasitas implementasi kebijakan luar negeri. Pada masa Bolsonaro, jarak antara preferensi presiden dan etos diplomasi profesional di Itamaraty menimbulkan ketegangan yang memengaruhi konsistensi sinyal kebijakan. Pada masa Lula, penyelarasan antara pesan presiden, kepentingan pembangunan, dan prioritas kementerian membuka kembali ruang untuk memimpin agenda global secara lebih kredibel.

Kaitan antara lingkungan domestik dan daya tawar multilateral menjadi salah satu temuan kunci. Melemahnya kredensial lingkungan pada masa Bolsonaro menurunkan kepercayaan internasional dan menyulitkan pembentukan koalisi. Ketika pemerintah baru memulihkan kebijakan perlindungan hutan dan menata ulang mekanisme pendanaan, reputasi mulai pulih dan memberi efek limpahan pada isu-isu lain seperti perdagangan hijau, transisi energi, dan pendanaan adaptasi (Soreanu, 2021).

Meski demikian, penelitian ini juga menegaskan adanya elemen kesinambungan yang penting. Jalur menuju konvergensi standar ekonomi global dan tata kelola yang telah dibangun tidak terputus di tengah pergantian pemerintahan. Langkah seperti proses aksesi OECD tetap dilanjutkan karena menyangkut stabilitas investasi, akses pasar, dan kredibilitas kebijakan makro dalam jangka menengah. Duarte (2025), menunjukkan bahwa elemen kesinambungan ini sering luput dari perhatian publik karena fokus terlalu besar pada pertentangan politik.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini memperlihatkan bahwa peralihan dari Bolsonaro ke Lula bukan sekadar pergantian gaya diplomasi, melainkan repositioning strategis yang membawa konsekuensi nyata bagi kapasitas pengaruh Brasil. Kombinasi antara perubahan dan kesinambungan inilah yang menjelaskan mengapa performa multilateral Brasil pasca 2022 menjadi lebih meyakinkan, selama koherensi domestik tetap dijaga.

Kesimpulan

Perubahan kebijakan luar negeri Brasil dari era Jair Bolsonaro ke Luiz Inácio Lula da Silva memperlihatkan dua paradigma diplomasi yang bertolak belakang sekaligus saling melengkapi dalam konteks kesinambungan kepentingan nasional. Pada masa pemerintahan Bolsonaro, orientasi kebijakan luar negeri menunjukkan penurunan komitmen terhadap multilateralisme, penekanan pada kedaulatan domestik, serta penyusutan peran Brasil di berbagai forum internasional. Pendekatan yang konfrontatif terhadap lembaga global, pengabaian terhadap isu lingkungan, dan retorika nasionalis berdampak langsung terhadap reputasi serta daya tawar diplomatik Brasil di tingkat regional maupun global. Fenomena ini memperlihatkan bahwa preferensi ideologis dan tekanan politik domestik dapat memengaruhi arah dan intensitas partisipasi internasional suatu negara.

Sebaliknya pada masa pemerintahan Lula da Silva, Brasil menampilkan kebangkitan kembali diplomasi multilateral yang ditandai dengan partisipasi aktif dalam forum internasional, pemulihan reputasi lingkungan, dan upaya membangun solidaritas global berbasis nilai

keadilan sosial. Pendekatan ini menegaskan pergeseran dari kebijakan yang tertutup menuju strategi keterlibatan yang inklusif, di mana multilateralisme dijadikan instrumen utama untuk memperkuat pengaruh dan legitimasi internasional. Reorientasi ini terlihat dalam langkah konkret seperti kembalinya Brasil ke CELAC, kepemimpinan dalam G20, reaktivasi Amazon Fund, dan penguatan hubungan dengan BRICS serta OECD. Upaya tersebut menunjukkan bahwa reputasi dan komitmen lingkungan digunakan sebagai modal diplomasi yang efektif dalam mengembalikan kepercayaan internasional.

Secara teoretis penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan *Comparative Foreign Policy* (CFP) dalam menjelaskan variasi perilaku luar negeri lintas pemerintahan. Pendekatan CFP mampu mengurai bagaimana variabel domestik seperti ideologi kepemimpinan, struktur politik, serta dinamika ekonomi menentukan perilaku diplomatik suatu negara. Dalam konteks Brasil CFP membantu menjelaskan bahwa perubahan dari Bolsonaro ke Lula tidak hanya mencerminkan pergantian figur politik, tetapi juga transformasi nilai, prioritas, dan persepsi terhadap sistem internasional. Meskipun terjadi perbedaan signifikan dalam gaya dan orientasi kebijakan, terdapat pula unsur kesinambungan, terutama dalam upaya mempertahankan kredibilitas ekonomi melalui integrasi dengan standar OECD dan reformasi tata kelola global. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan luar negeri sangat bergantung pada konsistensi antara kebijakan domestik dan komitmen internasional. Reputasi internasional tidak dapat dibangun tanpa kebijakan nasional yang mendukung, terutama dalam isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Pada masa Lula, kebijakan domestik yang memperkuat perlindungan hutan, keberlanjutan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan terbukti memperkuat posisi Brasil dalam negosiasi multilateral. Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang berhasil adalah kebijakan yang mampu mensinergikan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global.

Dengan membandingkan kedua periode pemerintahan tersebut penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Brasil tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga fungsional dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas diplomasi negara. Pemerintahan Lula berhasil mengembalikan citra Brasil sebagai aktor utama dalam sistem internasional, sementara warisan struktural dari pemerintahan sebelumnya tetap menjadi dasar bagi kesinambungan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu arah kebijakan luar negeri Brasil pada periode 2019–2025 dapat dipahami sebagai proses rekonstruksi peran strategis, di mana negara berupaya menyeimbangkan antara kepentingan domestik, kredibilitas internasional, dan aspirasi untuk menjadi pemimpin dalam tatanan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Referensi

- Berringer, T. and Botão, G.R. (2024) “Bolsonaro’s foreign policy and the Brazilian bourgeoisie,” *Contexto Internacional*, 46, p. e20230033.
- BRICS (2023) *Lula: “Multilateralism is the only path we should follow”*. Available at: <https://brics.br/en/news/lula-multilateralism-is-the-only-path-we-should-follow?utm>
- Carlos, P. and Rodrigues, D.S. (2025) “The Crises and Agony of International Development Cooperation: Consequences for Brazilian Foreign Policy,” *Contexto Internacional*, 47(1), pp. 208–235. Available at: <https://doi.org/10.1590/S0102->

8529.20254701e20230026.

Duarte, G.R. (2025) "The Rise and Decline of Brazil as a Peacekeeper," *Revista Brasileira de Política Internacional (RBPI)*, 68(1). Available at: <https://doi.org/10.1590/0034-7329202500101>.

GIGA Hamburg (2020) *Brazil First, Climate Last: Bolsonaro's Foreign Policy*. Available at: <https://www.giga-hamburg.de/>.

Salomón, M. (2025) "Brazil is a Christian and Conservative Country with Family as its Foundation': The Role of Defender of the Faith in Bolsonaro's Foreign Policy," *Contexto Internacional*, 47(1), pp. 63–85. Available at: <https://doi.org/10.1590/S0102-8529.20254701e20220031>.

Soreanu, C. (2021) "Brazilian foreign policy: from the combined to the unbalanced axis (2003/2021)," *Revista Brasileira de Política Internacional (RBPI)*, 64(1). Available at: <https://doi.org/10.1590/0034-7329202100111>.